

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KOTA SALATIGA



TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025
KOTA SALATIGA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Yth. Wali Kota Salatiga;

Yth. Wakil Wali Kota Salatiga;

Ykh. Jajaran Forkopimda Kota Salatiga;

Ykh. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga;

Ykh. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Salatiga;

Ykh. Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Walikota;

Ykh. Seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Salatiga;

Ykh. Para Camat dan Lurah se Kota Salatiga

Ykh. Para Hadirin dan Tamu Undangan yang berbahagia.

Alhamdulillah robbil alamin segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna dalam keadaan sehat wal afiat. Shalawat dan salam kami haturkan kepada suri tauladan kita nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi PKS untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Ucapan terimakasih kami sampaikan pula kepada saudara Walikota Salatiga yang telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sidang Paripurna yang terhormat;

Setelah pelaksanaan rapat-rapat pembahasan anggaran yang cukup menyita energi dan pikiran kita bersama; khususnya badan anggaran dan TAPD pada saat pembahasan rancangan perubahan KUA PPAS 2025 beberapa waktu yang lalu, dimana kita semua harus berpikir keras karena besarnya peningkatan jumlah kebutuhan belanja kita yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pendapatan kita sehingga menghasilkan defisit yang cukup besar;

Maka perkenanlah kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Salatiga menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Terkait dengan Pendapatan; khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita semua merasakan bahwa kenaikan PAD kita sebesar Rp.11.751.037.860,00 (*Sebelas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) bukanlah angka optimal yang kita harapkan karena ada beberapa pos PAD yang sudah kita rencanakan tapi kemungkinan besar tidak akan tercapai, dan tidak kita pasang seperti pada saat kita menetapkannya di APBD 2025 penetapan; sebagai contoh yang angkanya terkoreksi cukup besar misalnya;
 - a) PBJT-Hotel di APBD 2025 penetapan, kita memasang angka Rp.6.300.000.000,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) tapi kemudian di Rancangan Perubahan APBD 2025 kita hanya memasang Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) atau berkurang sebanyak Rp. 1.300.000.000,00. (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah)
 - b) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/ Opsen BBNKB yang semula di APBD 2025 penetapan kita pasang Rp.10.307.853.000,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) kemudian di Rancangan Perubahan APBD 2025 dipasang sebesar Rp.8.090.000.000,00 (Delapan Miliar Sembilan Puluh Juta Rupiah) berkurang sebanyak Rp.2.217.853.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);

- c) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang pada saat APBD 2025 penetapan kita pasang diangka Rp.7.550.000.000,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) akhirnya terkoreksi menjadi hanya Rp.3.498.000.000,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah); berkurang Rp.4.052.000.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Dua Juta Rupiah)

Sehingga secara garis besar perlu kita sampaikan bahwa pada Rancangan perubahan APBD 2025 ini kita cukup prihatin dan harus melakukan evaluasi terhadap kinerja kita; dimana dalam sektor pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita, kenaikannya tidak signifikan, sehingga total pendapatan kita di perubahan APBD 2025 hanya naik Rp. 26.605.416.860,00 (Dua Puluh Enam Miliar Enam Ratus Lima Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).

2. Sedangkan ketika kita berbicara masalah belanja, kita mendapatkan angka yang justru semakin besar; yang kemudian pada saat pembahasan kita harus berpikir keras; mana-mana saja pos belanja yang bisa kita rasionalisasi; sehingga sampai berhari-hari badan anggaran bersama TAPD harus rapat sampai larut malam;

Kenaikan pada pos-pos belanja seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa kita melambung cukup tinggi; di belanja pegawai misalnya; diawal rancangan perubahan KUA PPAS 2025 terpasang

angka Rp.480.188.483.994,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dan setelah kita bahas bersama beberapa kali kemudian terkoreksi menjadi Rp.466.342.400.236,00 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp.38.975.651.737,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dari angka yang dipasang di APBD 2025 Penetapan, sejumlah Rp.427.366.748.499,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);

Kenaikan ini tentunya mencerminkan beban rutin yang semakin besar, dan menekan ruang fiskal kita, dimana belanja pegawai kita melebihi angka 45% dari belanja APBD. Sehingga fraksi PKS meminta agar kedepan belanja pegawai kita harus diupayakan menseleraskan dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 146; dimana Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

Sidang Paripurna yang kami hormati

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Kota Salatiga Terhadap APBD Perubahan Tahun 2025. Apabila dalam penyampaian Pandangan Umum ini ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salatiga, 08 Agustus 2025

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KOTA SALATIGA**

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Nono Rohana, S.Ag | (Ketua) |
| 2. Agus Warsito | (Wakil Ketua) |
| 3. Heru Prastyo, SE, ME | (Sekretaris) |
| 4. Latif Nahari, ST | (Anggota) |

